

ANALISIS PAGU INDIKATIF KEJAKSAAN RI



Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab:

Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA., QHIA., QIA.

Penulis:

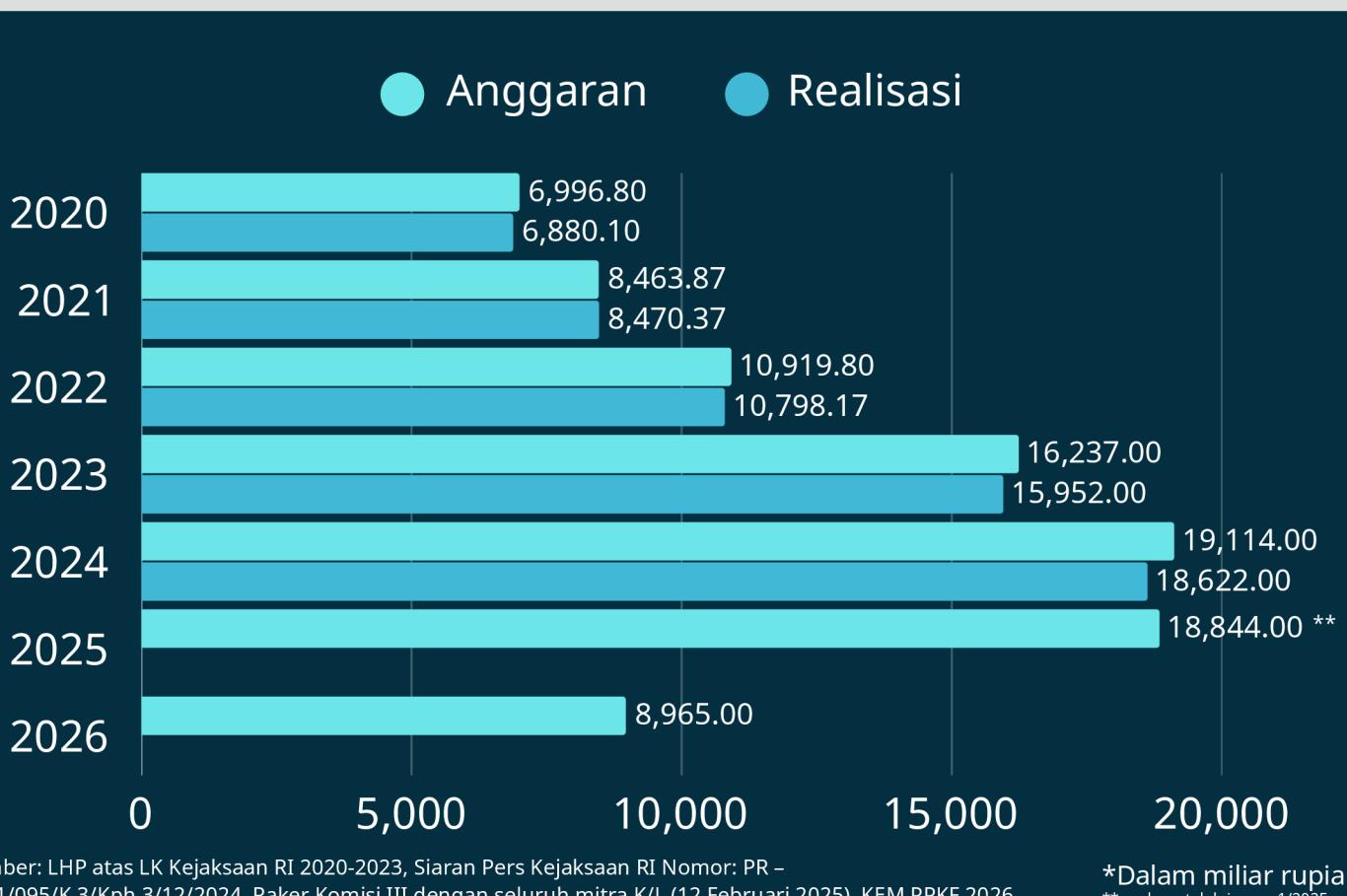
Fachry Ali Firdaus, S.E., Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si., Tio Riyono S.E.

JUNI 2025

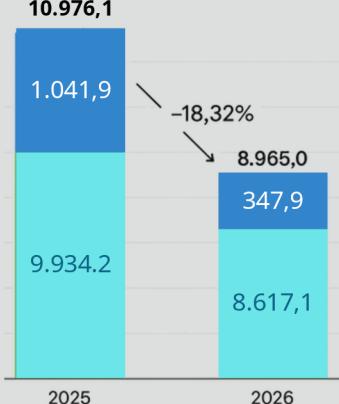
Daftar Isi

Pagu Indikatif 2026	02
Overview Anggaran 2020-2026	03
Output & Outcome Anggaran 2025	04
Kejaksaan RI dalam PN 07 RPJMN 2025-2029	05





**Pagu Indikatif Kejaksaan RI 2025 - 2026
(dalam miliar rupiah)**



Nilai Pagu Indikatif 2026 tersebut secara total menurun sebesar 18,32% persen jika dibanding Alokasi Anggaran dalam APBN 2025 (berdasarkan pagu indikatif) yang sebesar Rp10.976,1 miliar. Penurunan tersebut semakin besar jika dibandingkan alokasi DIPA pra Inpres 1/2025, yaitu sekitar 63,07% dan 52,43% pasca restrukturisasi dari Inpres 1/2025.

Overview Anggaran 2020-2026

HALAMAN 3

→ **Analisis Anggaran 2020-2026**

Anggaran Kejaksaan RI tumbuh lebih dari 2,7 kali lipat dalam kurun waktu empat tahun, dari Rp6.996,80 miliar di tahun 2020 menjadi Rp19.114,00 miliar pada tahun 2024.

Sepanjang tahun 2020-2024, realisasi anggaran Kejaksaan selalu mendekati 100%, dengan realisasi tertinggi sebesar 100,08 persen di tahun 2021. Tahun 2024 menjadi periode dengan alokasi anggaran tertinggi sebesar Rp19.114,00 miliar dengan realisasi mencapai Rp18.622,00 miliar. Anggaran 2026 jika besarannya sesuai dengan nilai pagu indikatif, maka akan menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir.

→ **Proporsi Terbesar Anggaran Kejaksaan RI Dialokasikan pada Program Dukungan Manajemen**

Sepanjang tahun 2021-2023, proporsi terbesar anggaran Kejaksaan RI dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen berkisar antara 92% - 96%. Proporsi tersebut berfluktuasi namun menunjukkan tren meningkat. Berdasarkan pagu indikatif 2026, proporsi Program Dukungan Manajemen mencapai 96,2%.

→ **Porsi Belanja Modal Menjadi Jenis Belanja Terbesar**

Selama periode 2020-2023, struktur belanja Kejaksaan RI mengalami perubahan. Belanja Modal menjadi komponen dominan menggeser posisi Belanja Pegawai sebagai jenis belanja terbesar. Pada 2020, Belanja Pegawai mendominasi dengan porsi 60,18% dari total anggaran, sementara Belanja Modal hanya menyumbang 18,38%. Namun, terjadi pergeseran hingga 2023 di mana Belanja Modal mencapai 58,12% dari total belanja, sedangkan Belanja Pegawai menyusut menjadi 28,46%. Meskipun proporsinya menurun, secara nominal Belanja Pegawai tetap tumbuh dari Rp4,14 triliun pada 2020 menjadi Rp4,54 triliun pada 2023. Sementara itu, Belanja Modal mengalami lonjakan sebesar 633% dari Rp1,26 triliun pada 2020 menjadi Rp9,27 triliun pada 2023, mengindikasikan prioritas institusi pada peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana. Belanja Barang konsisten menjadi komponen terkecil yang proporsinya terus menurun dari 21,44% menjadi 13,42%, meskipun secara nominal meningkat dari Rp1,47 triliun menjadi Rp2,14 triliun.

Output & Outcome Anggaran 2025

HALAMAN 4

SASARAN/OUTCOME	KELUARAN/OUTPUT	Perkiraan Volume Target 2025
Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Diklat Pemulihan Aset (Orang)	840 (Orang)
	Diklat SPPA (Orang)	2 (Rekomendasi Kebijakan)
	Diklat Lingkungan Hidup (orang)	3 (Rekomendasi Kebijakan)
Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Penyuluhan Hukum di Kejati/Kejari/Cabjari (Orang)	4138 (kegiatan)
Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana	Bimtek Penuntut Umum sebagai Fasilitator dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (laporan/Orang)	55 (Unit)
Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Penanganan Perkara Siber	1 (Rekomendasi Kebijakan)
	Penanganan dan Pemulihan Aset yang terkait Perkara (laporan)	38 (Laporan)
Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan	Pembangunan Ruang Pemantauan Siber dan Pusat Data SOC Kejaksaan RI (unit) Pengembangan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data SOC (unit) Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data Security Operation Center (SOC) TA. 2024 (unit)	1 (Paket)

Kejaksaan Dalam PN 07 RPJMN 2025-2029

PRIORITAS NASIONAL (PN)	Asta Cita 7 (PN 07) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyaludungan
PROGRAM PRIORITAS (PP)	07.04. Transformasi Sistem Penuntutan dan <i>Advocaat Generaal</i>
SASARAN PROGRAM PRIORITAS	01. Terwujudnya efektivitas dan integrasi kebijakan bidang penuntutan di Kejaksaan RI dan Jaksa Agung sebagai pengacara negara
INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS	01. Persentase peningkatan pengendalian perkara 02. Persentase kecukupan, kesesuaian, dan pengembangan SDM Kejaksaan
KEGIATAN PRIORITAS (KP)	07.04.01. Penguatan Kelembagaan Kejaksaan
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS	01. Terwujudnya sistem penuntutan yang integratif
INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS	01. Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai

**TARGET INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
PRIORITAS**

- Persentase peningkatan pengendalian perkara ditargetkan 69 persen di tahun 2029, dengan target sebesar 61 persen di tahun 2025 (indikator baru)
- Persentase kecukupan, kesesuaian, dan pengembangan SDM Kejaksaan di tahun 2029 ditargetkan sebesar 80 persen, dengan target di tahun 2025 sebesar 60 persen (indikator baru).

**TARGET INDIKATOR
SASARAN KEGIATAN
PRIORITAS**

Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai di 2029 ditargetkan sebesar 69 dengan baseline 2025 ditargetkan sebesar 61 persen (indikator baru).

Guna mencapai target indikator Program Prioritas, Kejaksaan akan menjalankan Kegiatan Prioritas yang didukung dengan 2 proyek prioritas, yaitu Pengendali Perkara, dan *Advocaat Generaal*.

Kejaksaan Dalam PN 07 RPJMN 2025-2029

PRIORITAS NASIONAL (PN)	Asta Cita 7 (PN 07) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyaludungan
PROGRAM PRIORITAS (PP)	07.04. Transformasi Sistem Penuntutan dan <i>Advocaat Generaal</i>
SASARAN PROGRAM PRIORITAS	01. Terwujudnya efektivitas dan integrasi kebijakan bidang penuntutan di Kejaksaan RI dan Jaksa Agung sebagai pengacara negara
INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS	01. Persentase peningkatan pengendalian perkara 02. Persentase kecukupan, kesesuaian, dan pengembangan SDM Kejaksaan
KEGIATAN PRIORITAS (KP)	07.04.02. Peningkatan Jumlah, Profesionalisme, dan Kesejahteraan Jaksa
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS	01. Terwujudnya kualitas dan kuantitas jaksa yang proporsional
INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS	01. Tingkat kecukupan personil jaksa 02. Tingkat pengembangan kapasitas personil jaksa 03. Tingkat kesesuaian pengelolaan SDM jaksa
TARGET INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase peningkatan pengendalian perkara ditargetkan 69 persen di tahun 2029, dengan target sebesar 61 persen di tahun 2025 (indikator baru) • Persentase kecukupan, kesesuaian, dan pengembangan SDM Kejaksaan di tahun 2029 ditargetkan sebesar 80 persen, dengan target di tahun 2025 sebesar 60 persen (indikator baru).
TARGET INDIKATOR SASARAN KEGIATAN PRIORITAS	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Tingkat kecukupan personil jaksa di 2029 ditargetkan sebesar 99,20 persen dengan baseline 2024 sebesar 98,02 persen. • Persentase Tingkat pengembangan kapasitas personil jaksa di 2029 ditargetkan sebesar 85 persen dengan baseline 2024 sebesar 10,65 persen. • Persentase Tingkat kesesuaian pengelolaan SDM jaksa di 2029 ditargetkan sebesar 90 persen dengan baseline 2024 sebesar 77,6 persen.

Guna mencapai target indikator Program Prioritas, Kejaksaan akan menjalankan Kegiatan Prioritas yang didukung dengan 2 proyek prioritas, yaitu Pemenuhan Sarana Prasarana dan Teknologi Informasi, serta Peningkatan Kompetensi.



Follow Kami



www.bkd.dpr.go.id



[pa3kn.bkdprri](https://www.instagram.com/pa3kn.bkdprri)